INDUSTRI HALAL DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: PERSPEKTIF MAQHASID SYARIAH

Nanda Meitasari¹, Dennis Pritazahra², Anggi Dwi Kasari³, Filda Fauzia Latifah⁴,
Amalia Nuril Hidayati⁵

^{1,2,3,4,5}Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: nandameitasari725@gmail.com¹, denispritazahra@gmail.com²,
anggidwikasari27@gmail.com³, fildafauzil@gmail.com⁴, amalianoeril@gmail.com⁵

Abstrak

Dalam artikel ini, peran *maqhasid syariah* dibahas sebagai dasar normatif untuk realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) terutama melalui pengembangan industri halal. *Maqashid syariah* termasuk perlindungan agama, jiwa, alasan, warisan dan kemakmuran, memiliki hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam SDG, seperti kemiskinan, kesehatan yang layak, pembentukan kualitas, dan pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi. Industri halal sebagai sektor ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga menawarkan solusi yang berkelanjutan, etis dan terintegrasi di berbagai bidang, termasuk makanan, keuangan, pariwisata, dan kosmetik. Melalui pendekatan analitik deskriptif, artikel ini menunjukkan bahwa penggunaan prinsip *Maqashid Syariah* dalam industri halal dapat menjadi alat strategis untuk mendukung agenda pembangunan global yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara *Maqashid Syariah* dan pembangunan berkelanjutan harus diperkuat untuk menciptakan tatanan ekonomi yang adil, manusia dan ramah lingkungan.

Kata Kunci: Industri Halal, Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), *Maqashid Syariah*

Abstract

In this article, the role of maqashid sharia is discussed as a normative basis for the realization of Sustainable Development Goals (SDGs) especially through the development of the halal industry. Maqashid sharia includes the protection of religion, soul, mind, inheritance and prosperity, has a close relationship with the values contained in the SDGs, such as poverty, decent health, quality formation, and integrated economic growth. The halal industry as an economic sector based on Islamic values not only meets the needs of Muslim consumers, but also offers sustainable, ethical and integrated solutions in various fields, including food, finance, tourism, and cosmetics. Through a descriptive analytical approach, this article shows that the use of Maqashid Sharia principles in the halal industry can be a strategic tool to support the global sustainable development agenda. Therefore, the synergy between Maqashid Sharia and sustainable development must be strengthened to create a just, humane and environmentally friendly economic order.

Keywords: Halal Industry, Sustainable Development (SDGs), *Maqashid Sharia*.

A. PENDAHULUAN

Industri berasal dari bahasa latin, yaitu *industria* yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Halal adalah sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang. Maka dari pengertian di atas dapat difahami bahwa industri halal adalah segala bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk baik berupa pengolahan bahan baku, dan pengembangan aspek lain yang dapat menjadi produk ekonomi yang diperbolehkan oleh syariat baik dalam proses pembuatan, usaha, penggunaannya, pemasarannya maupun pengembangannya bukan hasil dari kegiatan muamalah yang dilarang. Halal saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan menjadi salah satu sektor ekonomi global yang paling dinamis (Sulistiani, 2018).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kesepakatan yang menjadi rujukan dalam skema pembangunan dan perundingan negaranegara di dunia. SDGs dikonsepsikan sebagai rumusan kerja untuk 15 tahun ke depan hingga tahun 2030 (Fad, 2019). Dalam Islam prinsip *maqhasid* syariah telah lama diakui sebagai landasan nilai yang mengatur kehidupan umat, dengan fokus pada perlindungan terhadap lima aspek penting yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Tujuan utama dari *maqasid* ialah memberikan kemudahan serta menghapus kesulitan bagi umat manusia. Berdasarkan *maqhasid*, maka segala sesuatu yang merugikan baik kelangsunagn hidup manusia maupun rezeki harus dilawan. Oleh sebab itu, menjadikan SDGs sebagai media awal untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia (Sabil, 2022).

Melalui pembahasan ini, bertujuan untuk menganalisis hubungan antara *maqhasid* syariah dan pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang industri halal. Hal ini sangat penting untuk menguatkan dasar etika dan spiritual dalam praktik ekonomi modern, serta menawarkan pendekatan alternatif yang lebih holistik dan berkeadilan dalam mencapai SDGs.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur dan studi pustaka. Penelitian dilakukan dengan mengeksplorasi berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang membahas industri halal serta konsep Maqhasid Syariah. Data yang dikumpulkan bersifat sekunder dan dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menggali hubungan antara perkembangan industri halal dan pencapaian tujuan pembangunan dalam kerangka Maqhasid Syariah. Proses analisis mencakup identifikasi tema-tema utama, interpretasi isi literatur, serta penyusunan sintesis pemikiran dari perspektif ilmiah yang berbeda, guna memperoleh pemahaman yang dalam dan menyeluruh terhadap topik yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan ruang lingkup industri halal, serta peran strategisnya dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur dan studi pustaka, penelitian ini juga berfokus pada analisis kontribusi industri halal dalam mencapai tujuan pembangunan dari perspektif Maqashid Syariah. Terdapat lima aspek utama yang dipertimbangkan: menjaga agama (hifzh al-din), menjaga jiwa (hifzh al-nafs), menjaga akal (hifzh al-'aql), menjaga keturunan (hifzh al-nasl), dan menjaga harta (hifzh al-mal) lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah berbagai literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hubungan antara perkembangan industri halal dan penerapan nilai-nilai Maqhasid Syariah dalam pembangunan. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi konseptual untuk pengembangan industri halal yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan berkelanjutan secara sosial dan ekonomi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Maqhasid Syariah* Sebagai Kerangka Etika

Secara etimologi, *Maqhasid al-Syari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *Maqhasid* dan *al-Syari'ah*. *Maqhasid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqsad*, *qasd*, *maqsid*, atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah, ke tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan (Sulistiani, 2018). Secara konseptual, *maqhasid asy-syari'ah* adalah tujuan atau

rahasia yang ditetapkan oleh Syari' (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syari'ah (Ismanto, 2016). *Maqhasid Syariah* tidak hanya menjadi dasar dalam penilaian praktik ekonomi tetapi juga mendorong terbentuknya kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas. Salah satu tujuan utama dari *Maqhasid Syariah* adalah mencapai keadilan sosial, yang berarti kekayaan harus didistribusikan dengan cara yang adil agar kesenjangan ekonomi dapat diminimalkan (Algifari & Andrini, 2024). *Maqhasid Syariah* berhubungan dengan tujuan dan hikmah yang ditentukan oleh syari untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di muka bumi. Tujuannya adalah mendatangkan kemaslahatan dengan memenuhi *al-Maqhasid al-khamsah* dan meninggalkan sesuatu yang bisa merusak *al-Maqhasid al-khamsah*, yang pada akhirnya akan memberikan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat kelak (Ismail, 2021). Terdapat lima tujuan utama *maqhasid syariah*, diantaranya: (Sabil, 2022)

1. Menjaga agama (*Hifdz Ad-Din*)

Kata al-din (agama) secara etimologis berarti balasan (*al-jaza*), perhitungan (*al-hisab*), dan taat (*al-fa'ah*). Menurut Ibn 'Asyür, kata ini menjadi *haqīqah 'urfīyyah* yang berarti kumpulan akidah dan perbuatan yang diajarkan Rasulullah yang bersumber dari Allah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pemeliharaan agama adalah memelihara Islam, iman, dan ihsan. Memelihara agama sebagai *maqhasid* diwujudkan oleh syariat dengan menetapkan sarananya (*wasā'il*). Menurut Ziyad Muhammad Ahmīdān, ada tiga *wasā'il* dari sisi wujud, yaitu: 1) pemeliharaan agama; 2) penerapan hukum agama; 3) dakwah dan menuntut ilmu.

2. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Pemeliharaan jiwa berarti menjaganya dari kemusnahan, baik individual maupun komunal. Maksudnya bukan kisas sebagaimana pendapat sebagian *fukaha*, pemeliharaan jiwa terpenting adalah penyelamatan seperti mengobati orang sakit." Menurut Ahmīdān, untuk tujuan pemeliharaan jiwa dari sisi wujud, syariat menetapkan empat ketentuan sebagai *wasā'il*: 1) nikah; 2) nafkah terhadap anak dan orangtua; 3) membolehkan makan dan minum; 4) membolehkan makan yang haram dalam kondisi darurat.

3. Menjaga akal (*Hifdz Al-'Aql*)

Kata *'aql* secara etimologis berarti menahan (*al-imsāk*). Al-Jarjānī menyatakan kata *'aql* diambil dari *'iqal al-ba'ir* (kekang keledai), artinya menahan pemiliknnya dari hal-hal yang buruk. Akal adalah potensi intelek (*al-quwwah al-idrākīyyah*) dalam diri manusia yang dengan jalannya sendiri mampu memperoleh pengetahuan, bukan pewahyuan.

4. Menjaga Harta (*Hifdz Al-Mal*)

Secara bahasa kata al-māl berarti berbagai barang yang biasa dimiliki. Secara istilah, harta adalah sesuatu yang cenderung disenangi oleh tabiat manusia, dan dapat disimpan untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan, baik ia benda bergerak atau bukan. 31 Sebagai bagian dari *al-maqhāsid al-darūriyyah*, pemeliharaan harta dari sisi wujud dilaksanakan oleh al-Syari' dengan mensyariatkan usaha mencari rezeki.

5. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*)

Para ulama berbeda-beda dalam menjelaskan maksud dari pemeliharaan keturunan. Al-Juwaynī menyebutnya alat reproduksi (*wa al-furūj ma'ṣūmat bi al-hudud*), sedang al-Ghazālī menyebut kata al-nasl yang berarti reproduksi (*al-khalq*) dan juga berarti anak keturunan (*al-ẓuriyyah*) Adapun al-Rāzī menyebut kata *al-nasab* yang berarti kerabat dekat (*al-qarābah*) dari garis keturunan ayah. Dari pendapat ini Ibn 'Āsyūr memilih *al-nasl* sebagai *al-darūriyyah*, karena terkait dengan reproduksi (*al-khalq*) yang pengabaianya dapat menimbulkan mafsadat.

Dalam menjaga agama, industri halal berkontribusi dalam memudahkan umat menjalankan syariat melalui konsumsi dan transaksi yang sesuai dengan aturan Islam. Dari segi perlindungan jiwa dan akal, produk halal menjamin keamanan dan kebersihan, serta bebas dari zat-zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental. Dalam industri halal, perlindungan agama memastikan bahwa produk dan layanan selaras dengan *Syariah*. Perlindungan Agama merupakan salah satu komponen utama *Maqhasid Syariah* yang dapat diterapkan pada semua aspek selain industri halal. Hal ini terutama karena agama terutama difokuskan pada hubungan antara Allah dan manusia (Hilme & Raffi, 2024).

Selain itu, industri halal juga berperan dalam menjaga harta melalui sistem ekonomi yang adil dan transparan, yang terbebas dari praktik riba dan penipuan. Dengan demikian, industri halal tidak hanya memfasilitasi kepatuhan pada aspek-aspek keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan kehidupan yang berkualitas dan bermartabat. Sehingga industri halal dapat menciptakan produk dan layanan yang etis, aman dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Keterkaitan Industri Halal dengan Pembangunan Berkelanjutan

Sustainable Development Goals (SDGs) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan

tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan bumi. Tujuan ini dirancang oleh negara-negara pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama sampai tahun 2030 (Trimulato & Rahmatia, 2020) Terlaksananya ekonomi yang berkah, jika tiga komponen pelaksana (motivator) ekonomi dapat berjalan sinergi, yaitu pemerintah sebagai pionir, regulator, dan fasilitator beserta regulasinya, dan juga lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana teknis. Kemudian konsumen, industri dan investor menjadi partisipan ekonomi. Partisipasi industri halal pada perhelatan megaprojek *Sustainable Development Goals* (SDGs) berperan dalam tujuh belas tujuan SDGs tersebut. Proses yang berkaitan dengan pelatihan, pendidikan, dan inisiasi program profesional lainnya dengan tujuan meningkatkan tingkat pengetahuan, skill, kemampuan, serta nilai dan fungsi social merupakan acuan dari sumber daya manusia (Hasanah, 2022).

Untuk mempersiapkan ekosistem industri halal di Indonesia, diperlukan dukungan dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggi melalui tiga prinsip utama pembangunan sumber daya manusia, yaitu: hati, pikiran, dan keterampilan. Pendekatan yang pertama adalah dari hati, yaitu dengan memfokuskan tujuan untuk bertaqwa kepada Allah. Selanjutnya, kita perlu melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan yang memadai (pikiran) serta memiliki keterampilan khusus yang relevan dengan industri tertentu. Indonesia menjadi salah satu negara yang giat mempromosikan dirinya sebagai pusat halal dunia dan pelopor globalisasi sertifikasi halal. Hal ini didukung dengan peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sebagai penyelenggara, bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal yang termasuk juga LPPOM-MUI, sertastakeholder yang lain yang berperan aktif mengembangkan industri halal (Syuhada, 2023). Penetapan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi tonggak penting yang mengubah paradigma sertifikasi halal dari sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory). Implementasi UU JPH diperkuat dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mengambil alih wewenang sertifikasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Transisi kelembagaan ini bertujuan memperkuat kapasitas pengawasan dan standardisasi produk halal secara nasional (Hidayati & Ridwan, n.d.)

C. Peran Industri Halal

Industri halal terus menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya.

Tabel 1. Perkembangan Industri Halal di Indonesia Tahun 2019-2022

KATEGORI	PERSENTASE
1. SEKTOR PENGOLAHAN ATAU MANUFAKTUR (2022)	17,88%
2. INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN (2022)	6,23%
3. INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN OBAT TRADISIONAL (2022)	1,74%
4. PARIWISATA (2019)	4,9%
5. PARIWISATA DIMASA COVID-19 (2020)	2,2%
6. SEKTOR EKONOMI KREATIF (2020)	-2,4%
(2021)	2,9%

Sumber: web <https://kneks.go.id/storage/upload/1719104658-Master%20Plan%20Industri%20Halal%20Indonesia%202023-2029.pdf>

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dinyatakan pada tahun 2022, sektor manufaktur menyumbang 17,88% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Ini menunjukkan bahwa manufaktur tetap menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Dari sektor ini, subsektor makanan dan minuman (6,23%) serta, industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (1,74%) memiliki kontribusi signifikan. Kedua subsektor ini relevan dengan industri halal, karena standar halal banyak diterapkan di bidang makanan, minuman, dan farmasi. Artinya, sektor-sektor tersebut dapat lebih ditingkatkan daya saingnya melalui sertifikasi halal dan inovasi berbasis syariah. Kontribusi pariwisata sebelum pandemi (2019) sebesar 4,9% terhadap PDB menunjukkan potensi besar, terutama jika dikembangkan sebagai pariwisata halal. Walaupun sempat terdampak signifikan oleh pandemi menjadi 2,2% pada (2020), sektor ini tetap mampu menyerap 21,3 juta tenaga kerja (16,2% dari total nasional). Sedangkan pada Sektor ekonomi kreatif, mengalami perlambatan sebesar -2,4% pada 2020 akibat pandemi tetapi, sektor ini tumbuh sebesar 2,9% pada 2021. Pada 2021, sektor ini menyumbang 7,0% PDB (setara IDR 1191 triliun) dan menyerap 21,9 juta tenaga kerja (16,7% dari total nasional).

Angka ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif termasuk sektor-sektor halal di dalamnya tidak hanya kontributif terhadap ekonomi, tetapi juga terhadap lapangan kerja. Jadi, industri halal memiliki posisi strategis sebagai sumber pertumbuhan baru dalam kerangka industrialisasi Indonesia. Dan sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai tambah produk, kepercayaan konsumen global, dan ekspor, terutama ke negara-negara dengan populasi Muslim besar. Sinergi antar kementerian (Perindustrian, Kemenparekraf, Kementerian Agama, dan lain-lain) penting untuk mendorong ekosistem industri halal yang solid.

Pertumbuhan ini jelas memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut bisa dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019). Kontribusi terhadap PDB ini tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor terhadap produk halal. Industri halal sangat berpeluang untuk menambah nilai ekspor di Indonesia. Nilai ekspor yang dihasilkan berkisar USD 5,1 miliar hingga USD 11 miliar pada setiap tahunnya (Adamsyah & Subakti, n.d.). Angka tersebut bisa ditingkatkan lagi melalui peningkatan kualitas produk halal yang diekspor. Penetapan harga yang kompetitif juga dapat diterapkan agar produk bisa bersaing dengan produk dari negara lain.

Industri halal dengan segala potensinya dapat kita gunakan untuk mendorong peningkatan nilai cadangan devisa. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan diantaranya, meningkatkan nilai ekspor industri halal, meningkatkan potensi pariwisata halal, dan meningkatkan peran industri keuangan *syariah* dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan (Adamsyah & Subakti, n.d.). Selain itu, program inklusi keuangan dapat memberikan kemudahan dalam bertansaksi bagi UMKM. Semakin banyak UMKM yang bertransaksi di industri keuangan, maka dapat meningkatkan market share industri keuangan *syariah*. Dampaknya, industri keuangan *syariah* akan semakin menguat sehingga dapat mensejahterakan Masyarakat secara luas. Berikut beberapa sektor-sektor industri halal sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan, antara lain: (Fathoni & Syahputra, 2020)

1. Sektor makanan dan minuman halal.

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan utama bagi semua makhluk hidup. Sebagai umat muslim, dalam memilih makanan dan minuman harus benar-benar diperhatikan. Mulai dari bahan-bahan, cara pembuatan bahkan tempat produksinya. Hal ini sangat penting, selain untuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi tersebut halal,

kegiatan ini juga dapat memberikan efek yang baik untuk semua umat. Seperti mengetahui kebersihan dan keamanan sehingga dapat memberi kepercayaan kepada semua umat. Industri halal dalam sektor makanan dan minuman ini juga dapat membangun kesadaran masyarakat dalam memilih produk untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Selain itu, adanya sektor makanan dan minuman halal juga dapat membuka peluang usaha bagi UMKM, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen tetapi mereka juga sebagai pelaku ekonomi yang dapat memperoleh manfaat dari industri halal ini. Peran pemerintah juga dibutuhkan supaya sektor makanan dan minuman halal semakin berkembang tidak hanya di dalam negeri tetapi juga diluar negeri.

2. Sektor keuangan *syariah*

Sektor keuangan *syariah* beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), serta menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi, mendorong aktivitas usaha yang halal dan produktif, serta meningkatkan agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan keuangan yang baik. Dengan adanya transaksi yang transparan hingga munculnya investasi syariah membuat masyarakat mulai meninggalkan yang melanggar syariat islam. Dengan berjalannya sektor keuangan syariah dapat mendorong investasi berkelanjutan dan terciptanya pembangunan ekonomi yang adil, transparan dan berkelanjutan.

3. Sektor wisata halal

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan pariwisatanya. Dalam sektor wisata halal ini para wisatawan muslim dapat berkunjung ke masjid, museum hingga mencicipi kuliner halal. Sektor wisata halal ini dapat membentuk pariwisata yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, penginapan ramah keluarga, serta aktivitas wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tujuan utama dari sektor wisata halal ini yaitu supaya dapat memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman dan aman bagi wisatawan Muslim, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keagamaannya. Selain itu, sektor wisata halal juga berkontribusi dalam memperkuat identitas budaya lokal dan memperluas akses wisata berbasis nilai moral dan etika. Manfaat dari sektor ini antara lain meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Muslim, terbukanya peluang usaha baru di bidang kuliner halal, penginapan, dan jasa perjalanan yang memberi dampak peningkatan pendapatan daerah. Dengan prinsip pelayanan yang sesuai syariah,

wisata *syariah* turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat lokal, serta praktik wisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

4. Sektor *fashion*

Dalam islam, cara berpakaian seorang muslim memiliki *syariat* yang sesuai dengan islam. Walaupun memiliki aturan tersendiri, seorang muslim tetap bisa mengikuti tren *fashion* dengan tetap menjaga penampilan yang nyaman dan menarik. Dengan menutup aurat secara sopan dan elegan seorang muslim tetap bisa memilih busana tanpa mengesampingkan estetika dan kreativitas. Hal ini juga diimbangi dengan pemilihan bahan yang ramah lingkungan. Adanya *fashion* ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat, seperti mendorong pertumbuhan industri kreatif, membuka lapangan pekerjaan bagi desainer, penjahit, dan pelaku UMKM, serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Selain itu, *fashion* halal juga berperan dalam membentuk ekonomi berkelanjutan melalui inovasi kreatif yang tetap menghormati nilai moral, kearifan lokal, dan tanggung jawab sosial.

5. Sektor kosmetik halal

Saat ini kosmetik merupakan sebuah kebutuhan yang digunakan sebagai bentuk menyayangi diri sendiri. Tidak hanya seorang wanita tetapi pria juga banyak sekali yang mulai merawat dirinya dengan menggunakan berbagai kosmetik seperti penggunaan sunscreen, pelembab bibir, dan lainnya. Pria yang menggunakan kosmetik bukan berarti mereka menyimpang ajaran islam, tetapi merupakan upaya untuk menjaga kesehatan kulit. Sektor kosmetik halal menghasilkan produk yang berbahan aman, terhindar dari bahan yang haram dan najis. Industri ini juga berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan yang mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan serta membuka peluang usaha di bidang kecantikan.

6. Sektor farmasi halal

Sektor farmasi halal berfokus pada obat-obatan dan suplemen kesehatan yang terbuat dari bahan-bahan halal dan mengikuti proses yang sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah*. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa produk kesehatan yang dikonsumsi aman dan bebas dari bahan-bahan haram, seperti alkohol atau gelatin hewani yang tidak halal, serta diproses dengan standar kebersihan yang tinggi. Manfaat dari farmasi halal dapat dirasakan oleh seluruh umat yang menginginkan obat-obatan berkualitas. Selain berperan dalam menjaga kesehatan, industri ini juga mendorong inovasi dalam penelitian bahan halal, membuka peluang ekspor ke negara-negara

Muslim, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui praktik produksi yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Industri halal memiliki peran strategis dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui penerapan prinsip *Maqhasid Syariah* yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai bagian dari ekonomi berbasis nilai Islam, industri halal tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga mendukung pembangunan yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sektor-sektor seperti makanan dan minuman halal, keuangan *syariah*, wisata halal, *fashion*, kosmetik, dan farmasi halal menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pelestarian lingkungan. Dengan sinergi antara nilai-nilai syariah dan tujuan pembangunan global, industri halal dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan manusiawi, serta memperkuat peran Indonesia dalam kancah ekonomi global berbasis nilai moral dan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamsyah, B., & Subakti, G. E. (n.d.). Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Halal*, 73-74.
- Algifari, M. A., & Andrini, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *Journal of Sharia Economics Scholar*, 2.
- Fad, M. F. (2019). Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals. *Jurnal Iqtisad*, 146.
- Fathoni, M.A., & Syahputra, T.H. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4-5.
- Hasanah, H. (2022). Industri Halal Sebagai Sistem Pendukung Sustainable Development Goals Di Era Society 5.0. *Lant Tabur: Jurnal Ekonomi Syariah*, 54-56.
- Hidayati, A. N., & Ridwan. (n.d.). Transformasi Industri Halal di Provinsi Bali: Evaluasi Epektifitas Sistem Labelisasi Halal Pada Pertumbuhan Ekonomi Lokal. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*.
- Hilme, S. I., & Raffi, R. M. (2024). Maqasid Approach and Shariah Rules Towards Halal Industry. *Journal of Halal Science, Industry and Business*, 8.

- Ismail, N. (2021). *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: TAZKIA PRESS.
- Ismanto, K. (2016). *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jauhar, A. A.-m. (2016). *Maqasid Syariah*. Jakarta: AMZAH.
- Sabil, J. (2022). *Maqasid Syariah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Jurnal Law and Justice*, 93-94.
- Syuhada, E. F. (2023). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan dalam Sertifikasi Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 24.
- Trimulato, & Rahmatia. (2020). Ekonomi Islam dan Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Al-Buhuts*, 118.